

MODEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

IDENTIFICATION MODELS OF SOCIAL ISSUES IN THE URBAN SLUMS

Suradi

Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 0218017146
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Accepted: 2 April 2015; Revised: 29 May 2015; Approve: 20 June 2015

Abstract

Uncontrolled Rural-urban migration results excessive urbanization. In the urban areas, population density has a implication for the demands on employment and housing needs. If the city is not prepared to meet these demands, there will be a potential to cause various problems in the urban areas. Accordingly, this article aims to identify social problems in the urban slums. Based on the results of a literature review, in the urban slums there are a variety of social problems. The social problems need to be precisely identified, and in this article, there is an offer for an "identification model". This model is in the form of a circle which includes various aspects, and the aspects form a causality. Through this model, there will be comprehensive and detail information about the social issues on the essence and deepness of the problem as well as the linkages among the issues. The source of information to prepare this article were collected through the study of literature, written documents and internet. This article is expected to be a matter of social policy development and program-based data to realize clean, healthy and prosperous city.

Keywords: *urban slum, social problems, social policy.*

Abstrak

Migrasi desa kota yang tidak terkendali mengakibatkan terjadinya urbanisasi berlebih. Di perkotaan terjadi kepadatan penduduk yang berimplikasi pada tuntutan lapangan pekerjaan dan kebutuhan permukiman. Apabila kota tidak siap memenuhi tuntutan tersebut, maka kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai problema di perkotaan. Berkaitan dengan itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial di kawasan slum perkotaan. Berdasarkan hasil kajian literatur, di kawasan *slum* perkotaan terdapat berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut perlu temukenali dengan tepat, dan di dalam artikel ini ditawarkan sebuah "model identifikasi". Model ini berbentuk lingkaran yang di dalamnya mencakup berbagai aspek, dan aspek-aspek tersebut membentuk hubungan sebab akibat. Melalui model ini, akan diperoleh informasi permasalahan sosial secara komprehensif dan mendalam tentang hakikat dan kedalaman masalah, serta keterkaitan antar masalah. Sumber informasi untuk menyusun artikel ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur, dokumen tertulis maupun internet. Artikel ini diharapkan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan program sosial berbasis data dalam rangka mewujudkan kota yang bersih, sehat dan sejahtera.

Kata kunci: *permukiman slum, permasalahan sosial, kebijakan sosial.*

PENDAHULUAN

Urbanisasi dalam batas-batas yang wajar akan menguntungkan pembangunan perkotaan, karena memberi kontribusi yang nyata pada pertumbuhan pendapatan. Kondisi perekonomian akan mengalami peningkatan

seiring dengan naiknya persentase jumlah penduduk yang menetap dalam wilayah perkotaan. Namun demikian, ketika terjadi urbanisasi berlebih, maka di daerah perkotaan akan terjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks.

Fenomena urbanisasi berlebih yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya di dunia, seperti: India, Thailand, Negeria, Meksiko dan Venezuela. Menurut catatan Trotsenburg dari Bank Dunia (Kompas, 2015), setiap menit puluhan penduduk di Asia Timur pindah dari desa ke kota, dan antara tahun 2000 – 2010 diperkirakan hampir 200 juta penduduk pindah ke daerah perkotaan di Asia Timur. Perpindahan penduduk besar-besaran ini telah menciptakan kota-kota besar di dunia, seperti: Shanghai, Jakarta, Seoul dan Manila, serta ratusan wilayah perkotaan berskala menengah dan kecil menghadapi permasalahan berkaitan dengan pelayanan publik.

Situasi urbanisasi berlebih ini diperparah dengan kebijakan pemerintah kota yang lebih represif dan kontradiktif. Dikemukakan oleh Soto, bahwa akibat obsesi perencanaan kota yang ingin membangun kota serba megah dan indah, sering menyebabkan mereka salah langkah (Suyanto, 2013). Kondisi yang mudah dikenali sebagai dampak dari urbanisasi berlebih tersebut adalah munculnya kawasan permukiman perkotaan yang tidak layak huni dan bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi. Dibalik wajah kota yang serba megah dan wah, ternyata yang berselingkuh bukan hanya kekumuhan dan kesemrawutan lalu lintas, tetapi juga kesewang-wenangan. Kota makin tidak ramah bagi rakyat kecil (Gilbert dan Gruger, 2007; Suyanto, 2013).

Akibat terdinya urbanisasi berlebih, permukiman dan perumahan di kawasan perkotaan masih menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu secara geografi dan secara sosiografi. Secara geografi berkenaan dengan kondisi fisik lahan di mana digambarkan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh besarnya volume limbah dari rumah tangga maupun sektor industri. Sampah

rumah tangga dalam bentuk sampah basah maupun sampah kering (termasuk plastik) dan zat-zat kimia dari sektor industri, pada umumnya tidak dikelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan orang-orang yang ada di wilayah permukiman tersebut mengkonsumsi air yang baku mutunya sangat rendah. Berkaitan dengan aspek geografi, Bappenas melaporkan, bahwa sampai tahun 2014, ada 38.431 hektar kawasan kumuh di Indonesia (Kompas.com, 2014). Kawasan kumuh tersebut berada di 2.883 lokasi di 129 kabupaten/kota (Vivanews, 2014) dan dihuni 34,4 juta warga negara Indonesia (Waspada.co.id, 2014). Kemudian, menurut Kementerian Pekerjaan Umum, ada lima kawasan kumuh terparah di Indonesia, yaitu (1) Daerah Belawan Medan, (2) Kawasan Ciliwung Jakarta, (3) Kawasan Taman Sari Bandung, (4) Kawasan Boezem Surabaya dan (5) Kawasan Talo Makassar (Ariyanti, 2013). Kemudian, secara sosiografi menunjuk pada orang-orang yang mendiami kawasan permukiman tersebut, berkenaan dengan sikap mental dan perilaku sosial mereka dalam membangun jaringan kerja, baik pada aktivitas ekonomi maupun sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi dalam pengelolaan kawasan permukiman perkotaan (Zoebir, 2008; Pitomo, 1985).

Tumanggor (1985) berdasarkan hasil kajiannya memaparkan, bahwa ada pengaruh kualitas rumah terhadap perilaku menyimpang. Meskipun hubungannya lemah, tetapi sangat berarti. Semakin baik keadaan perumahan, semakin sedikit perilaku menyimpang. Tentunya faktor fasilitas seperti rumah, tanah perumahan dan fasilitas lingkungannya, seluruhnya ikut mempengaruhi perilaku penghuni tersebut kearah yang baik dan atau sebaliknya. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan Suradi (2002), bahwa di kawasan permukiman padat dan kumuh (*slum*), terdapat bentuk-

bentuk perilaku menyimpang, seperti perjudian, prostitusi, pelecehan seksual, penelantaran dan eksploitasi anak, minum-minuman keras dan zat adiktif, pemalak, dan penjambret. Perilaku-perilaku tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan keamanan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, mereka yang tinggal di kawasan permukiman *slum* mudah dimobilisasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti melakukan demo kenaikan harga BBM dan sembako, merusak fasilitas negara dan fasilitas publik, pembebasan lahan dan sebagainya.

Negara dan pemerintah juga mendapatkan dampak negatif dari permasalahan tersebut yang terjadi di kawasan permukiman *slum*. Selain menjadi gangguan dan ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan, juga akan mengganggu situasi perekonomian. Lebih jauh lagi, kawasan permukiman *slum* dapat menjadi indikator kegagalan kebijakan pembangunan yang selenggarakan pemerintah. Citra negara dan pemerintah akan jatuh di mata dunia, karena dinilai tidak mampu memberikan hak-hak warga negaranya.

Bertolak dari permasalahan tersebut, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial di kawasan permukiman *slum* perkotaan. Permasalahan sosial tersebut perlu temukenali dengan tepat, dan di dalam artikel ini ditawarkan sebuah “model identifikasi”. Melalui model ini, akan diperoleh informasi permasalahan sosial secara komprehensif dan mendalam tentang hakikat dan kedalaman masalah, serta keterkaitan antar masalah. Artikel ini diharapkan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan program sosial

berbasis data dalam rangka mewujudkan kota yang bersih, sehat dan sejahtera.

PEMBAHASAN

Model Identifikasi

Sebagai pengantar, perlu dipaparkan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan model yang dimaksud di dalam artikel ini. Model adalah alat bantu untuk menemukan akar penyebab timbulnya masalah dan sekaligus merumuskan dan menetapkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Namun model tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah satu kali untuk selamanya, atau memecahkan semua masalah yang dihadapi. Karena itu, model harus selalu diperbarui secara berkala karena segala sesuatu akan selalu berubah (Pamekas, 2013). Kemudian dikemukakan oleh Sterman (Pamekas, 2013), bahwa model adalah gambaran dunia nyata atau fenomena alam maupun kemasyarakatan tertentu yang dibuat oleh pembuatnya (pemodel) yang ditampilkan melalui indra persepsi. Oleh karena itu, model adalah penyederhanaan dari fenomena yang diamati, kemudian disajikan dalam bentuk mudah dipahami oleh pembuatnya melalui proses berpikir.

Bertolak dari pemikiran tersebut, model indetifikasi permasalahan sosial adalah gambaran tentang permasalahan sosial di kawasan permukiman perkotaan yang diamati dan disajikan secara sederhana, sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun para pemangku kepentingan. Berikut ini disajikan model identifikasi permasalahan sosial di kawasan permukiman perkotaan:



Model identifikasi permasalahan sosial di kawasan permukiman *slum* perkotaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urbanisasi Berlebih

Migrasi desa kota yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya urbanisasi berlebih. Urbanisasi berlebih merupakan faktor yang memicu pertambahan jumlah penduduk di kawasan permukiman perkotaan. Urbanisasi berlebih tersebut terjadinya karena arus perpindahan penduduk yang tidak terkendali dari daerah perdesaan dan atau daerah lain, baik lintas kabupaten atau lintas provinsi. Pada kasus DKI Jakarta, diperkirakan 80 persen penghuniliar yang mengakibatkan Jakarta tidak tertib dan tampak padat bukan warga DKI Jakarta (Tempo.com, 2014). Selain di DKI Jakarta, arus migrasi yang tinggi juga terjadi di kota Bandung (70,9%), Medan (62,4%) dan Surabaya (53,5%) (Noveria, 2010).

2. Aktivitas Sosial Ekonomi

Tumbuhnya kawasan permukiman berpengaruh pada meningkatkan aktivitas sosial dan perekonomian penduduk. Berbagai jenis aktivitas perekonomian penduduk di kawasan permukiman dapat dilihat dari pekerjaan penduduk. Jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan permukiman, seperti: pedagang asongan,

buruh lepas, buruh pabrik, tukang beca, sopir angkutan perkotaan, pengamendan sektor informal skala kecil (Suradi, 2005; Zoebir, 2008). Bahkan di antaranya ada pengangguran dan setengah pengangguran. Situasi tersebut menurut Gilbert dan Gugler (2007) menggambarkan terjadinya kelebihan tenaga kerja di perkotaan. Meskipun jenis aktivitas ekonomi tersebut memberikan imbalan yang rendah, tetapi berdasarkan penelitian Bryant dan White (1987) di beberapa Dunia Ketiga, bahwa pendapatan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika di tempat asal mereka.

Jenis-jenis pekerjaan tersebut termasuk sektor ekonomi informal yang tidak menghendaki persyaratan pendidikan dan keahlian tertentu. Modal utamanya adalah kesehatan dan keuletan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut termasuk jenis pekerjaan murah, sehingga memberikan penghasilan dalam bentuk upah atau gaji yang rendah. Rendahnya penghasilan di satu sisi, dan tuntutan kebutuhan hidup di sisi yang lain, memaksa migran pandai-pandai mengelola penghasilannya agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Strategi yang dilakukan migran untuk dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, yaitu melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam kegiatan ekonomi informal. Maka dari itu, ada sebagian dari migran yang lebih mengutamakan mencari uang daripada menyekolahkan anak-anaknya. Menurut mereka, anak-anaknya merupakan ‘aset ekonomi keluarga’, sehingga anak-anak tersebut dapat dimobilisasi untuk mengumpulkan uang bagi keluarga. Kegiatan ekonomi yang dilakukan anak-anak tersebut, antara lain menjadi pemulung, pengamen di bus atau jalan raya, buruh pasar dan kegiatan sejenis lainnya (Suradi dan Pudjianto, 2013).

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi migran di kawasan permukiman perkotaan, dapat disimpulkan bahwa mereka pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam rumpun penduduk miskin. Berbeda dengan penduduk miskin di perdesaan, penduduk miskin di perkotaan menghadapi situasi yang lebih kompleks. Contoh situasi yang dihadapi migran, yaitu status lahan yang ditempati. Sebagian migran menempati kawasan permukiman dengan status ilegal, dan tidak dimilikinya administrasi kependudukan, dan pada akhirnya situasi ini akan membebani pemerintah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan.

3. Masalah Lingkungan Fisik dan Perumahan

Kemampuan ekonomi yang rendah menyebabkan migran tidak mampu menempati rumah yang layak huni. Rumah dibangun sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan mudah rusak (kardus, triplek dan seng bekas). Rumah yang berhimpit-himpitan di kawasan permukiman tersebut biasanya tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih, penerangan listrik dengan sumbuangan resmi, drainase, dan pembuangan sampah. Kawasan permukiman biasanya pada musim hujan menjadi becek, di sana sini air tergenang dan terjadi banjir. Sebagian kawasan permukiman sebagai jalur aliran air limbah pabrik yang memengaruhi kualitas air bersih. Air tersebut dimanfaatkan penduduk untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk mencuci dan mandi. Kondisi tersebut mengindikasikan, bahwa migran di perumahan kumuh sangat rentan terjangkit penyakit.

Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa perumahan kumuh didefinisikan sebagai lingkungan perumahan berpenghuni sangat padat, yaitu melebihi 500 orang per ha, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Rumah-rumahnya berukuran kecil di bawah standar, serta saling berhimpitan.

Prasarana lingkungan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terhitung minim. Selain itu, pada umumnya perumahan kumuh menyerobot tanah negara atau tanah milik orang lain secara ilegal. Lingkungan perumahan kumuh digambarkan dengan kondisi tempat tinggal yang berdesak-desakan, luas rumah yang tidak sebanding dengan penghuninya, fungsinya hanya sebagai tempat berlindung diri dari panas dan hujan. Tata letak lingkungan perumahan tidak beraturan. Sarana dan prasarana lingkungan tidak ada atau tidak memadai. Penghuninya tidak mempunyai pendapatan tetap, serta biasanya tidak tercatat sebagai penduduk setempat. Selain itu, secara keseluruhan lingkungan permukiman rawan terhadap bahaya banjir, kebakaran dan penyakit menular.

Kemudian dikemukakan oleh Grimes (Pitomo, 1995), bahwa permukiman kumuh atau slum, ditandai oleh sekelompok bangunan di suatu daerah dengan keburukan-keburukan yang berlebihan, berkondisi kurang sehat, kekurangan fasilitas dan kenikmatan. Kondisi ini akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik dan moral penduduknya. Tumanggor (1985), menyebutkan ada beberapa ciri fisik permukiman kumuh, yaitu:

- a. Jarak antara satu rumah ke rumah sudah terlalu rapat, pada umumnya tidak dilengkapi sumur, WC, kamar mandi, tanpa ventilasi/jendela, dan tidak ada tempat untuk membuang sampah.
- b. Jumlah kamar tidur dan ruang tamu umumnya tidak lengkap dan tidak sebanding dengan jumlah penghuninya.
- c. Bahan bangunan rumah, atap, dinding, lantai terdiri dari bahan yang tidak kuat.
- d. Saluran air yang mengalirkan air dari rumah-rumah ke got induk tidak ada atau tidak berfungsi mengalirkan air,

sehingga menimbulkan genangan air dan tumpukan sampah.

- e. Tidak dialiri aliran listrik dan cenderung gelap.
- f. Letak rumah tidak beraturan, sehingga terdapat kebutuhan-kebutuhan jalan di dalamnya.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan permukiman kumuh, Auslan (Suyanto, 2013), mengemukakan ada lima konsekuensi yang mesti ditanggung warga kota yang tinggal di wilayah permukiman kumuh atau permukiman liar, yaitu:

- a. Orang terpaksa membangun rumah di tempat yang buruk dan berbahaya bagi kesehatan.
 - b. Karena status mereka yang tidak legal dan tidak menentu, mereka hanya sedikit sekali menerima bantuan atau tanpa bantuan sama sekali dari pemerintah.
 - c. Karena penghuni permukiman itu dalam keadaan tidak menentu, karena mereka sendiri tidak tahu akan digusur atau tidak, maka mereka tidak berani memperbaiki perumahan mereka.
 - d. Kota itu sendiri menjadi berkembang secara serampangan.
 - e. Karena statusnya sebagai permukiman liar, perkampungan miskin itu lebih banyak mendapat tekanan dari petugas dan pengusaha serta penguasa setempat.
4. Sikap Mental dan Perilaku Sosial

Istilah mental dan pikiran ‘kumuh’ ini diadaptasi dari pemikiran Pamekas (2013) dalam memahami berbagai permasalahan yang ada kawasan permukiman perkotaan. Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa rumah kumuh membuat pikiran kumuh. Membiarkan rumah dan lingkungan kumuh, secara tidak langsung sama dengan mengkondisikan pikiran, mental dan moral penghuninya agar “kumuh”. Bertolak

dari pemikiran Pamekas tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan permukiman perkotaan yang kumuh, akan berdampak pada sikap mental dan perilaku sosial penduduknya. Orang-orang di kawasan permukiman kumuh, menampilkan sikap mental dan perilaku sosial yang seringkali tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Sikap mental dan perilaku sosial yang ditampilkan seperti: merusak fasilitas umum, minum minuman keras, berjudi, pemerasan, tindak kekerasan, kata-kata kasar dan jorok, pelecehan seksual dan eksploitasi anak.

Kemudian menurut Brodin dan Zeisil (Purwaningsih, 1985), kampung kumuh atau slum dibedakan menjadi dua, yaitu slum fisik dan slum sosial. Slum fisik berkaitan dengan suatu daerah di mana nilai fisik sebagian besar fasilitas penghuninya berada di bawah standar normal. Sedangkan slum sosial ditandai dengan berlangsungnya nilai-nilai yang tidak baik dalam interaksi sosial, komunikasi sosial dan aktivitas yang negatif, seperti tindak kriminal, perjudian, pelacuran dan tindakan lain yang sifatnya menyimpang dari aturan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial yang menyimpang, Kartono (2007) menggunakan konsep ‘patologi sosial’. Menurut Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Selanjutnya, dikatakan bahwa semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), maka perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Bertolak

dari definisi tersebut, maka perilaku yang disebut patologi sosial adalah perilaku tidak sesuai dan atau melanggar norma hukum formal dan standar sosial yang berlaku di masyarakat. Selain menggunakan konsep patologi sosial, Kartono (2007) juga menggunakan konsep 'tingkah laku menyimpang' untuk menunjukkan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, dan tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Dikemukakan oleh Kartono, bahwa ciri-ciri tingkah laku menyimpang dibedakan dengan tegas, yaitu:

- a. Aspek lahiriah, yaitu tingkah laku yang bisa diamati dengan jelas. Penyimpangan lahiriah yang verbal dalam bentuk makian, kata-kata kotor yang tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah dan ungkapan-ungkapan yang tidak lazim digunakan dalam hubungan sosial. Penyimpangan lahiriah yang non verbal, yaitu semua tingkah laku yang nyata kelihatan.

Di kawasan permukiman kumuh, aspek lahiriah penyimpangan perilaku berdasarkan hasil penelitian Tumanggor (1985), seperti: bicara kotor, membuang sampah sembarangan, membuang kotoran di sembarang tempat, pemerasan/pungli, tidak melapor ketua RT. Kemudian menurut hasil kajian Zoebir (2008), perilaku menyimpang lahiriah di permukiman kumuh, seperti: mengemis, berjudi, mencopet, pelacuran, mabuk-mabukan, mencoret-coret fasilitas umum dan penipuan.

- b. Aspek-aspek simbolik yang tersembunyi, yaitu sikap-sikap hidup, emosi-emosi, sentimen-sentimen dan motivasi-motivasi yang mengembangkan tingkah laku menyimpang. Penduduk di kawasan permukiman kumuh mudah digerakkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan yang mereka tidak tahu persis

tujuannya asalkan memperoleh imbalan. Seperti digerakkan untuk demonstrasi menentang kebijakan pemerintah kota.

Perilaku sebagaimana diuraikan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran hidup yang bernilai bagi kehidupan yang diharapkan semua manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh North (Kartono, 2007), bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran hidup yang bernilai bagi satu kebudayaan atau satu masyarakat, harus disertakan etik sosial guna menentukan cara pencapaian, secara etis-susila harus bisa dipertanggungjawabkan, sebab manusia normal dibekali alam dengan budi dan hati nurani, sehingga ia dianggap mampu menilai baik dan buruknya setiap peristiwa.

5. Masalah Sosial

Orang-orang di permukiman kumuh dengan sikap mental dan perilaku sosial tersebut, dalam perspektif pekerjaan sosial dikatakan tidak mampu berfungsi sosial atau ketidakberfungsian sosial (*social disfunctioning*). Dikemukakan oleh Siporin (Fahrudin, 2013), bahwa ketidakberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, keberfungsian sosial orang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya. Orang sebagai individu maupun anggota kelompok atau komunitas yang mengalami disfungsi sosial, mereka itu dikelompokkan orang-orang yang bermasalah sosial. Sebagian dari mereka itu masuk ke dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti: gelandangan, pengemis, pejaja seks komersial, fakir miskin, dan anak jalanan.

Pada PMKS dengan status penduduk tidak tetap (migran serkuler), pandai

menutupi jati dirinya bahwa mereka sebagai PMKS. Mereka pandai mengelola hasil usahanya, sehingga memiliki tabungan dari hasil kegiatan ekonominya. Secara berkala hasil usahanya itu dikirimkan ke tempat asal. Masyarakat di tempat asal tidak banyak mengetahui dan tidak peduli dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada tetangganya itu di kota. Masyarakat hanya melihat langsung kalau tetangganya yang 'bekerja' di kota itu sudah menempati rumah bagus, memiliki perabotan rumah yang mewah dan memiliki kendaraan bermotor. Informasi ini yang menjadi faktor penarik terjadinya migrasi desa kota atau urbanisasi.

Pemecahan Masalah

1. Perumusan Masalah

Uraian sebelumnya sudah menjelaskan fenomena kawasan permukiman slum perkotaan yang ditandai dengan kekumuhan, baik secara fisik maupun secara sosial. Kekumuhan fisik akan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan kekumuhan sosial akan menjadi tugas Kementerian Sosial. Sebelumnya sudah diidentifikasi permasalahan sosial yang ada di kawasan permukiman yang dikategorikan tidak layak huni, yaitu: kemiskinan, ketelantaran anak (pekerja anak, anak jalanan), dan ketunaan sosial (gelandangan dan pengemis, penjaja seks komersial jalanan). Mereka itu dalam perspektif Kementerian Sosial masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, migran di kawasan permukiman *slum* melakukan aktivitas ekonomi informal, baik yang legal (buruh, asongan, buruh, pemulung, sektor informal, pengamen, sopir) maupun yang ilegal (penjaja seks komersial, gelandangan dan pengemis). Sebagian dari mereka membentuk

komunitas yang bersifat eksklusif, yang kurang membaur dengan komunitas lain. Komunitas ini mengembangkan norma-norma yang terbatas berlaku bagi komunitasnya sendiri, dan memperlihatkan kecenderungan perilaku yang menyimpang dari norma dan standar sosial yang berlaku umum.

Bertolak dari uraian di atas, maka permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah (a) kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar rendah, (b) aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar terbatas, (c) peran serta penduduk dalam pembangunan perkotaan rendah, dan (d) berpotensi mengganggu dan mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, dan oleh karena itu perlu pemahaman secara komprehensif.

a. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rendah

Pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dipisahkan dengan besarnya pendapatan migran, dan besarnya pendapatan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perekonomian migran. Apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran (kesenjangan *income*), maka migran tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan uraian itu, maka intinya terletak pada rendahnya pendapatan migran di kawasan perumahan perkotaan.

b. Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar terbatas

Pelayanan sosial dasar meliputi: pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta ketersediaan infrastruktur sosial. Rendahnya penghasilan atau kemampuan secara

ekonomi, menyebabkan migran di kawasan permukiman kumuh tidak mampu mengakses pelayanan sosial dasar yang disediakan oleh pemerintah kota. Mereka tidak tercatat sebagai penduduk setempat, sehingga tidak memiliki identitas kependudukan. Sebagian dari mereka menempati lahan ilegal seperti bantaran sungai, pinggir rel kereta api, dan lahan-lahan kosong milik pemerintah kota. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dari pemerintah kota. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi keluarga, sehingga tidak bersekolah.

c. Peran serta dalam pembangunan perkotaan rendah

Kebiasaan hidup di kawasan permukiman kumuh, menyebabkan migran tidak memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampah tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir dimusim hujan. Permukiman secara fisik kotor, jorok, becek, bau menyengat dan tidak tertata dengan baik. Kesadaran untuk memelihara dan merawat fasilitas umum yang disediakan pemerintah kota sangat rendah. Terjadinya pencurian listrik, air PAM dan kabel sambungan telepon, merupakan contoh kasus yang kerap kali terjadi di kawasan permukiman kumuh.

d. Berpotensi mengganggu dan mengancam stabilitas sosial dan ekonomi

Kawasan permukiman slum perkotaan dan orang-orang yang ada di dalamnya, sebagai kondisi yang mengganggu dan mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, bahwa selain keburukan-keburukan secara fisik, di

kawasan permukiman *slum* juga terjadi keburukan-keburukan secara sosial. Orang-orang yang menghuni kawasan permukiman slum adalah orang-orang yang cenderung berperilaku tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku umum atau berperilaku menyimpang.

2. Pemecahan Masalah

Pada artikel ini, pemecahan masalah didasarkan pada perspektif pekerjaan sosial yang bertumpu pada konsep '*human and social environment*'. Berkaitan dengan itu, Huttman (1981), mengemukakan bahwa bidang permukiman dan perumahan menjadi sasaran intervensi pekerjaan sosial, karena lingkungan fisik memengaruhi kualitas hidup dan lingkungan sosial yang mana pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung. Lingkungan yang kondusif diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia secara memuaskan. Perumahan yang buruk dan penuh sesak, terbukti berdampak negatif pada citra diri, situasi psikologis dan kesejahteraan penduduk, seperti timbulnya kecemasan dan konflik dalam menghadapi situasi kehidupan.

Bertolak pada desain intervensi pekerjaan sosial, maka di sinilah urgensinya dilakukan identifikasi secara komprehensif dan mendalam (asesmen) terkait dengan masalah sosial di kawasan permukiman perkotaan. Kegiatan ini sebagai tahap awal dari proses profesional dalam pekerjaan sosial, dan oleh karena itu mengharuskan dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Istilah asesmen dalam pekerjaan sosial ini tidak jauh berbeda dengan istilah diagnosis pada praktik kedokteran. Berbagai fenomena yang mengindikasikan 'sakit' dilakukan penelusuran untuk mengetahui 'sumber sakit'-nya. Hasil diagnosis inilah yang menjadi dasar dokter melakukan tindakan medis. Apakah pasien

perlu operasi, amputasi, obat-obatan dan atau layanan medis lainnya. Pada praktik pekerjaan sosial, hasil asesmen akan menjadi dasar pekerja sosial profesional melakukan tindakan intervensi sosial kepada klien, apakah menggunakan pendekatan individual, kelompok maupun komunitas.

Permasalahan sosial di kawasan permukiman *slum* perkotaan bersifat multi-dimensional, karena beririsan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Bertolak dari kompleksitas tersebut, maka intervensi pekerjaan sosial yang akan dilaksanakan tidak bisa hanya menggunakan pendekatan tunggal atau satu disiplin saja. Implikasinya, bahwa di dalam pemecahan masalah sosial menjadi keharusan untuk melibatkan disiplin dan profesi lain. Selain itu, pemecahan permasalahan kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban. Pendekatan ketertiban diperlukan, tetapi pendekatan yang lebih diutamakan adalah pendekatan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan pendekatan pemecahan permasalahan di kawasan permukiman kumuh ini, Climord dan Bainpoen (Tumanggor, 1985), menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga selama ini masih menonjolkan pendekatan keamanan dan ketertiban, dan sebaliknya kurang mempertimbangkan pendekatan kesejahteraan. Sepanjang tidak tertanggulangi permukiman liar ini dengan *social approach*, sepanjang itu pulalah perilaku menyimpang akan terus terjadi dan meningkat.

Pada rangka pemecahan masalah, perlu mempertimbangkan sistem, program dan pelayanan yang relevan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sistem Dasar Perubahan

Pemecahan masalah yang dikembangkan dalam menangani permasalahan sosial

di kawasan permukiman *slum* perkotaan berbasis hasil asesmen, dan sistem dasar perubahan. Ada empat komponen di dalam sistem dasar perubahan menurut Pincus dan Minahan (1973), yaitu: *client system*, *change agen system*, *target system* dan *action system*.

1) Sistem sasaran (*client system*)

Sistem sasaran adalah orang-orang yang menjadi warga kawasan permukiman perkotaan, yaitu: keluarga miskin, anak telantar, lanjut usia telantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, penjaja seks komersial dan korban tindak kekerasan serta PMKS lainnya.

2) Sistem pelaksana perubahan (*change agen system*)

Sistem pelaksana perubahan adalah pihak yang menjadi pelaku utama dalam pemecahan masalah, yaitu institusi kesejahteraan sosial. Berdasarkan jenis-jenis PMKS hasil asesmen maka satuan kerja teknis yang menjadi pelaksana perubahan adalah unit penanggulangan kemiskinan perkotaan, direktorat kesejahteraan anak, unit rehabilitasi tuna sosial, dan unit korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Satuan kerja teknis tersebut melaksanakan kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi pada semua tahapan kegiatan.

3) Sistem target (*target system*)

Sistem target adalah pihak-pihak yang dapat memberikan sumber-sumber dalam mempermudah dan mempercepat pemecahan masalah. Pihak-pihak dimaksud, yaitu tokoh masyarakat, aparat kelurahan dan para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di kawasan permukiman.

4) Sistem kegiatan (*action system*)

Sistem kegiatan adalah institusi/

unit kegiatan di luar institusi/unit kesejahteraan sosial, antara lain dari instansi pendidikan nasional, keagamaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan UKM, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan instansi pemerintah lain yang relevan berdasarkan hasil asesmen. Selain dengan instansi pemerintah, intervensi dilakukan dengan melibatkan dunia usaha dan organisasi sosial sesuai dengan kapasitasnya.

Pemecahan masalah yang bertumpu pada sistem dasar perubahan tersebut, pada hakikatnya adalah sinergitas program di satu kawasan permukiman *slum* perkotaan. Hal ini berbasis pada realitas sosial, bahwa di kawasan permukiman *slum* perkotaan terdapat permasalahan sosial yang bersifat multi-dimensional. Maka pemecahan masalah yang hanya dilakukan oleh satu sektor, diyakini tidak akan mampu memecahkan permasalahan secara tuntas.

b. Program Pemecahan Masalah

1) Pembongkaran

Status lahan kawasan permukiman kumuh sebagian ilegal, dan pada umumnya lahan milik pemerintah kota, seperti: di pinggiran rel kereta api, tanah pengairan, bantaran sungai, pesisir pantai, di bawah jembatan dan kolong jalan tol. Pembongkaran permukiman kumuh dilakukan begitu diketahui ada satu rumah atau bangunan yang berdiri di atas lahan ilegal. Karena itu, pembongkaran ini lebih bersifat preventif terjadinya kawasan permukiman kumuh. Pembongkaran dapat dilakukan oleh penghuni sendiri ataupun oleh petugas yang berwenang.

2) Rehabilitasi Permukiman (*In situ*)

Pada program ini dilakukan rehabilitasi kawasan permukiman, di mana penduduk

tetap tinggal di lahan tersebut. Kawasan ini biasanya merupakan kawasan legal, di mana penduduk memiliki bukti-bukti administrasi atas kepemilikan lahan kawasan yang ditempati.

3) Relokasi, Pemulangan dan Transmigrasi (*Eksitu*)

Pada program ini dilakukan pemindahan penduduk dari kawasan permukiman. Kawasan ini biasanya ilegal, di mana penduduk tidak memiliki bukti-bukti administrasi atas kepemilikan lahan kawasan yang ditempati. Alternatif yang dapat dilakukan pada model *eksitu*, yaitu:

a) Memindahkan penduduk ke rumah susun yang disediakan pemerintah kota

Pembangunan kawasan permukiman dengan program rumah susun (*Rusun*) sederhana dengan harga yang dapat dijangkau migran yang kondisi sosial ekonominya tergolong rendah. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk memastikan, bahwa penduduk yang tinggal di rumah susun adalah mereka yang masuk pada program relokasi. Selain itu, pemerintah kota juga bertanggung jawab untuk memastikan, bahwa jaringan sosial ekonomi di rumah susun dapat diteruskan dan dikembangkan. Jangan sampai penduduk mengalami *shock* karena di lingkungan baru tanpa jaringan sosial ekonomi.

b) Pemulangan penduduk ke tempat asal

Pemulangan penduduk ke tempat asal perlu melibatkan kabupaten/kota asal migran yang mendiami kawasan permukiman ilegal. Perlu dibangun kerjasama untuk memastikan bahwa

penduduk yang kembali ke tempat asal tersebut tidak kembali atau bermigrasi ke kota lagi. Dipastikan bahwa mereka mau melanjutkan kehidupannya di tempat asal dengan modal kerja (pelatihan keterampilan, modal usaha) yang sudah disiapkan pemerintah kota.

c) Penduduk disertakan pada program transmigrasi

Penyertaan migran pada program transmigrasi perlu dilakukan secara sinergis dengan instansi terkait dan pemerintah daerah yang menjadi tujuan transmigran. Program transmigrasi ini dimungkinkan tidak hanya di sektor pertanian, akan tetapi juga di sektor-sektor lain seperti: perikanan, kehutanan, perkebuan dan perindustrian.

c. Pelayanan dan Bantuan Sosial

1). Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial diarahkan pada memberikan pemahaman kepada penghuni kawasan permukiman, bahwa mereka membangun kawasan permukiman yang melanggar peraturan perundang-undangan. Melalui penyuluhan sosial, penghuni diharapkan menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, bersedia membongkar tempat tinggalnya dan atau mendukung pembongkaran oleh petugas yang berwenang.

2). Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial diarahkan pada perubahan sikap mental dan perilaku migran agar mereka memiliki pemahaman tentang lingkungan permukiman yang sehat, dan termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan menuju hidup bersih, sehat dan sejahtera. Bimbingan sosial ini

diberikan pada model insitu maupun program eksitu/semua program.

3). Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha diarahkan untuk membuka usaha baru dan atau mengembangkan atau penguatan usaha migran yang selama ini sudah berjalan. Bimbingan dan pelatihan meliputi bimbingan manajemen usaha, dan keterampilan kerja (vokasional) berdasarkan minat dan pertimbangan pasar. Pada bimbingan dan pelatihan usaha ini, diberikan bantuan modal usaha, baik untuk membuka usaha baru atau pengembangan/penguatan usaha yang sudah ada. Pelatihan usaha ini diberikan pada model insitu maupun program eksitu/semua program.

4). Pelayanan Akses

Pelayanan akses dimaksudkan agar penduduk di kawasan permukiman terakses dengan bantuan pendidikan (KIP) dan pelayanan kesehatan (KIS) serta bantuan sosial lainnya (KSKS dan KKS). Berkaitan dengan kartu-kartu tersebut, persyaratan bagi mereka yang tidak memiliki identitas kependudukan dapat diatasi dengan surat keterangan dari pemerintah kota atau pejabat yang berwenang. Pelayanan akses ini diberikan pada program insitu maupun eksitu/khusus pada program rumah susun.

5). Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial diarahkan untuk memberikan kesadaran, pengetahuan baru, menjangkau dengan pemilik sumber dan memberikan dorongan agar migran mau melakukan perubahan. Pendampingan ini dilakukan dalam mekanisme kelompok. Pendamping dari unsur pekerja sosial pada model insitu, relokasi dan kembali ke tempat asal.

Sedangkan bagi mereka yang mengikuti program transmigrasi, disediakan pendamping lapangan khusus di lokasi transmigrasi. Pendampingan ini diberikan pada program insitu maupun eksitu/khusus pada program rumah susun, dan transmigrasi.

6). Bantuan sarana prasarana

Bantuan sarana prasarana diarahkan pada penataan lingkungan permukiman menuju permukiman dan perumahan yang bersih dan sehat. Pada model insitu, intervensi dilakukan di kawasan permukiman penduduk. Sarana prasarana yang diperlukan seperti: jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah, drainase dan MCK umum. Selain itu bantuan sarana prasarana yang berkaitan dengan tempat ibadah, tempat rekreasi warga (taman warga), taman bacaan dan sarana olah raga. Bantuan sarana prasarana tersebut tentu mempertimbangkan ketersediaan dan kelayakan lahan di kawasan permukiman.

PENUTUP

Di Kawasan permukiman slum perkotaan terdapat berbagai permasalahan, baik permasalahan fisik maupun permasalahan sosial. Untuk memperoleh informasi yang obyektif, faktual dan komprehensif tentang permasalahan di kawasan pemukiman slum perkotaan, pada artikel ini ditawarkan 'model identifikasi' dalam bentuk lingkaran dengan lima aspek yang membentuk hubungan sebab akibat. Melalui model ini, permasalahan sosial umum maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat diperoleh informasinya secara obyektif dan faktual.

Selain output dari model identifikasi yang berupa informasi permasalahan sosial, artikel ini juga menyajikan program-program yang

dapat memecahkan permasalahan di kawasan pemukiman slum perkotaan. Program-program dimaksud, yaitu program preventif (pembongkaran), rehabilitasi, relokasi, pemulangan dan transmigrasi. Program-program tersebut memerlukan sinergitas antar lintas sektor, maupun antara pusat dengan daerah pengirim migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F., (2013), "5 Kawasan Kumuh Terparah di Indonesia", Jakarta, <https://binis.liputan6.com/rad/687844/yuk-intip-5-kawas-n-kumuh-terparah-di-indonesia>, diakses tgl 28 januari 2015.
- Bryant, C.& White, L.G, (1987), Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang (peterjemah Rusyanto L), Jakarta: LP3ES.
- Chrismanning dan Effendi, T.N, (1983), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gilbert. A.&Gugler, J., (1996), Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gode D DH, (1984), "Urbanisasi dan Urbanisme", dalam Schoorl JW (1984), Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang (RG Soekadijo penterjemah), Jakarta: Gramedia.
- Huttman, E. D, (1981), "Social Service in the Field of Housing and the Physical Enviroment", in Neil Gilbert and Herry Specht, 1981, Handbook Of the Social Service, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

- Kartono, K., (2007), *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompas.com, (2014), “Bappenas: Masih Ada 38.431 Hektar Kawasan Kumuh di Inonesia, Jakarta, Selasa 23 Desember 2013.
- Main, H.&Williams, S.W, (Ed) (1994), *Environment and Housing in Third World Cities*, New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Noveria, M., (2010), “Fenomena Urbanisasi dan Kebijakan Penyediaan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan Indonesia”, *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, Edisi XXXVI, No 2, Jakarta: LIPI.
- Pamekas, R, (2013), *Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman*, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Pincus, A. and Minahan, A., (1973), *Social Work Practice: Model And Methode*, Illinois: Peacock Publisher Inc.
- Pitomo, S., (1985), “Kebutuhan Dasar Kelompok Berpenghasilan Rendah di Kota Jakarta”, dalam Mulyanto Sumardi dan Dieter Evers (Ed), (1985), *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*, Jakarta: PT Rajawali.
- Purwaningsih, E. (1985), “Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Perumnas Klender”, dalam Mulyanto Sumardi dan Dieter Evers (Ed), (1985), *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*, Jakarta: PT Rajawali.
- Purwanto, H., (2010), *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Raharjo, (1983), *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Suradi, (2002), “Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya: Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam Suradi, (2005), *Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya terhadap Kebijakan sosial dan Pelayanan sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Swastika Media Citra.
- Suradi, (2011), *Problema dan Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis*, Jakarta: P3KS press.
- Suradi dan Pudjianto, B., (2013), *Problema dan Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Perkotaan*, Jakarta: P3KS press.
- Suyanto, B., (2013), *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Malang: Intrans Publishing.
- Tempo.com, (2014), “Ahok: 80 persen Penghuni Liar Bukan warga DKI, Jakarta, <http://www.tempo.com/read/news/2014/05/29/083581924/Ahok-80-Persen-Penghuni-Liar-Bukan-Warga-DKI>, diakses tgl 28 januari 2015.
- Trotsenburg, Axel Van, (2015), “Membangun Kota yang Menguntungkan Si Miskin”, Jakarta, Kompas, Rabu, 28 Januari 2015 Halaman 7.
- Tumanggor, R., (1985), “Perumahan Liar dan Perilaku Menyimpang”, dalam Mulyanto Sumardi dan Dieter Evers (Ed), (1985), *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*, Jakarta: PT Rajawali.

Vivanews.co.id, (2014), “Indonesia Punya 2.883 Kawasan Kumuh di 129 Kabupaten/Kota”, Jakarta, <http://bisnis.news.co.id/news/rad/522377-indonesia-punya-2-883-kawasan-kumuh-di-129-kabupaten-kota>, diakses tgl 28 Januari 2015.

Waspada.co.id, (2014), “34,4 Juta Warga RI Tinggal di Permukiman Kumuh”, Jakarta, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content%view-article&id=337388:344-juta-warga-ri-tinggal-di-permukiman-kumuh&catid=18:bisnis&itemid=95, diakses tgl 28 Januari 2015.

Zoebir, Z.I, (2008), “Perilaku Menyimpang Masyarakat Migran Permukiman Kumuh di Perkotaan”, Jakarta, <http://zuryawanisvandiarzaebir.wordpress.com/200808/09/perilaku-menyimpang-masyarakat-migran-permukiman-kumuh-di-perkotaan>, diakses tgl 28 Januari 2015.